

SUMBER : *Kompas*

HARI/TGL. : *Sen 27-5-1985*

HAL./KOL. : *IV/3-7*

KODE : *28*

Materialis, Moralis, Normalis

Oleh Selo Soemardjan

KOMPAS hari Minggu 19 Mei yang lalu mengumumkan hasil penelitian yang isinya disimpulkan dengan judul *Wajah Bingung Pemuda Kita*. Dengan hati-hati sekali Kompas menyebutkannya sebagai penelitian penjaikan, dan hal-hal yang ditemukan mungkin bisa jadi indikator situasi kepermudaan kita masa kini. Kerendahan hati yang pantas dihargai.

Tanpa menilai mutu metode penelitian yang diterapkan, saya ingin menanggapi hasil-hasil yang diumumkan itu.

Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif. Dan seperti biasa hasil kuantitatif memerlukan penjelasan kualitatif. Saya ingin ikut-ikutan mencoba memberikan penjelasan atas beberapa bagian saja. Bahan saya dari pengamatan baik di kota-kota maupun di desa-desa.

Sayang sekali, konsep pemuda dalam penelitian itu ditentukan amat luas, yaitu umur 15 sampai 30 tahun. Padahal anak-anak 15 tahun berbeda dari orang 30 tahun dalam pengalaman hidupnya, temperamennya dan harapannya pada hari-hari mendatang. Anak-anak umur 15 - 20 tahun pada umumnya belum berkeluarga, masih hidup di bawah naungan orangtua, jiwanya masih penuh idealisme dan cita-citanya tinggi. Kalau umurnya sudah 21 sampai 25 tahun, kebanyakan sudah berkeluarga, mulai hidup berdiskari, idealismenya sudah tercampur dengan realisme dan cita-cita hidupnya mulai disesuaikan dengan kemampuannya pribadi.

Golongan antara umur 26 dan 30 tahun hanya sedikit yang belum berkeluarga; mereka harus menghadapi suka-duka kehidupan dengan kekuatan pribadi, idealismenya menjadi tipis, terletak di bawah realisme yang tidak selalu mengembirakan, kesadaran tentang apa yang diinginkan dan apa yang dimungkinkan menjadi jelas. Andaikata hasil penelitian Kompas itu dapat menunjukkan perbedaan antara ketiga golongan itu, akan lebih besar gunanya untuk mengerti proses perubahan sikap generasi muda kita dalam peningkatan umurnya.

Persaingan makin tajam

Memang tidak mudah bagi seorang pemuda untuk menentukan arah hidupnya dalam keadaan sekarang. Persaingan untuk mencari nafkah makin lama makin tajam, terutama di kota-kota besar. Ijazah perguruan tinggi yang terkenal, keahlian yang diakui oleh orang banyak, ketrampilan khusus dalam sesuatu bidang, adalah beberapa alat untuk ikut bersaing. Itu semuanya saya namakan syarat-syarat rasional.

Akan tetapi ada pula syarat-syarat lain yang lebih ampuh, yaitu syarat-syarat irasional. Syarat-syarat ini tidak diajarkan di sekolah, pun jarang sekali masuk dalam surat kabar, namun sering disebut dalam percakapan tidak resmi. Syarat-syarat irasional itu misalnya yang disebut dalam penelitian Kompas, yaitu koneksi dan sogokan, tetapi juga katrolan,

keanggotaan dalam kelompok yang sedang berkuasa, dan yang sukar sekali diperhitungkan atau diusahakan, nasib baik.

Syarat-syarat rasional termasuk bidang idealisme, dan syarat-syarat irasional termasuk bidang realitas. Keduanya sangat berbeda sifatnya, bahkan adakalanya bertentangan.

Dalam keadaan yang kontroversial itu seorang pemuda harus menentukan arah hidupnya. Juga jalan yang harus ditempuhnya, dan lagi pula alat-alat yang harus digunakannya. Tergantung dari pendidikan di sekolah, sosialisasi didalam keluarga dan realitas sosial yang tampak di sekelilingnya, ada tiga watak dasar yang kemudian dapat disandang oleh seorang pemuda. Watak dasar itu dibawanya juga setelah ia menjadi dewasa.

Seorang pemuda dapat menjadi materialis, yaitu orang yang mengejar tujuan materiel, atau lebih jelas kekayaan, dalam hidupnya. Seorang materialis pada umumnya lebih mengutamakan syarat-syarat irasional daripada yang rasional untuk mencapai tujuannya. Kalau perlu, dia tidak segan untuk menjadi oportunist, yang berani meloncat dari suatu kedudukan ke kedudukan lain, asal itu membawa keuntungan. Orang yang demikian itu dapat ditemukan di bidang politik praktis dan usaha ekonomi bebas. Orang Jerman mengatakan, bahwa bagi seorang materialis *haben* (mempunyai, memiliki) lebih penting daripada *sein* (nama baik, kehormatan).

Sebaliknya, seorang pemuda dapat menjadi moralis, yaitu seorang yang berpegang teguh pada moral atau nilai-nilai sosial yang luhur. Seorang moralis saking teguhnya berpegang pada moral, sering bersikap kaku; suka menyingkir dari hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraninya, bahkan kalau mungkin ingin mengubah lingkungan sosialnya, agar menjadi sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Baginya, *sein* adalah lebih luhur daripada *haben*. Orang yang demikian itu akan mengalami banyak konflik batin, apabila harus hidup dalam suasana politik praktis atau usaha ekonomi bebas.

Normalis

Selanjutnya ada orang yang puas menjadi normalis. Seorang normalis adalah seorang yang bersikap dan bertindak normal, artinya sesuai dengan kebiasaan umum. Apakah sikap normal itu menguntungkan atau merugikan, tidak menjadi soal besar. Orang yang demikian itu tidak mempunyai daya kreasi sendiri, tidak memiliki inisiatif dalam kerjanya, asal ikut arus sosial, mengikuti peraturan dan perintah atasan. Orang Jawa mengatakan *waton slamet*. Ia tidak mungkin menjadi

pemimpin, ia puas menjadi pengikut.

Kebanyakan pegawai negeri adalah normalis, juga banyak pemuda. Karena tidak memiliki prinsip-prinsip kehidupan sendiri, banyak normalis timbul dalam pancaroba budaya, yaitu dalam proses perubahan sosial-budaya yang cepat dan meluas, sehingga orang tidak tahu jelas nilai-nilai sosial mana yang masih berlaku dan mana yang sudah usang.

Mengingat terjadinya pancaroba budaya dewasa ini, yang menghasilkan banyak pemuda normalis, maka saya tidak heran kalau 52,7 persen dari responden penelitian Kompas itu memilih menjadi pegawai negeri daripada usaha sendiri atau pegawai swasta. Dengan sistem kepegawaian yang berlaku sekarang, dimana senioritas dan ijazah mengalahkan prestasi, kecerdasan dan kreativitas untuk kenaikan pangkat dan gaji, maka jiwa yang cocok buat pegawai negeri adalah jiwa normalis.

Sudah barang tentu ada hal-hal lain yang mendorong para pemuda memilih menjadi pegawai negeri. Seperti yang dikatakan oleh Arief Budiman, *job security* yang tinggi, dan yang disebut oleh Mochtar Buchori, pinter-bodoh dan rajin-malas sama saja.

Juga gengsi sosial seorang pegawai negeri, lebih-lebih yang dinamakan pembesar, cukup tinggi, oleh karena ia merupakan personifikasi kekuasaan pemerintah, yang di Indonesia, seperti juga di negara-negara berkembang lainnya, belum dapat disaingi oleh kekuasaan sektor swasta.

Kalau seorang normalis cocok jiwanya untuk menjadi pegawai negeri, apakah dia juga cocok buat pekerjaan pembangunan? Cukup saja, asal kepadanya diberikan kewajiban yang bersifat rutin dan ditempatkan di bawah pemimpin yang berani bertanggungjawab. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapakah yang cocok untuk memegang pimpinan dalam pembangunan, seorang materialis atau moralis?

Secara obyektif pertanyaan ini harus dijawab: seorang materialis. Karena apa? Karena ia mempunyai tujuan yang jelas, memiliki keberanian untuk mencari jalan yang dapat membawanya kepada tujuan itu. Dan karena itu ia sanggup untuk mengatasi segala kesukaran, lagi pula untuk berinisiatif serta menghargai kreativitas. Hanya saja semangat kerjanya dapat terlalu lurus menjurus kepada keuntungan dan kekayaan pribadi. Kepentingan proyek pembangunannya dapat dinomorduakan atau dinomortigakan. Korupsi, sogokan, penyelewengan di anggapnya wajar, asal saja mempermudah tercapainya tujuan dan tidak diketahui oleh pihak lain.

Inilah kenyataan di banyak bidang pembangunan, bahkan juga di bidang pemerintahan. Dan inilah yang menyebabkan 43,4

persen daripada responden menganggap koneksi dan uang sogokan sebagai cara yang efektif untuk mendapatkan pekerjaan. Dan juga menimbulkan pendapat pada 14,5 persen, bahwa korupsi adalah cara yang baik buat memperoleh kekayaan. Inilah yang amat menyedihkan kita semua.

Kombinasi yang serasi

Untuk memperbaiki sistem sosialnya, tidak ada gunanya untuk menyalahkan para responden itu. Yang perlu adalah, bagaimana dapat mengubah sikap hidup dan sikap kerja para materialis dalam pemerintahan, pembangunan dan juga dalam sektor swasta. Apakah mereka diganti saja dengan orang-orang moralis?

Saya ragukan, apakah seorang moralis yang benar-benar moralis murni, dapat berhasil lebih baik dalam pembangunan daripada seorang materialis. Tampaknya jawaban atas persoalan ini adalah gabungan antara materialis dan moralis. Artinya, semangat kerjanya seorang materialis yang diarahkan oleh jiwa seorang moralis, dapat merupakan kombinasi yang serasi untuk memegang pimpinan pembangunan, di bidang publik dan swasta, dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada evaluasi hasilnya.

Caranya menggabungkan bagaimana? Terus terang saya tidak dapat memberikan jawabannya yang mujarab seratus persen. Penyimpangan dari moral kerja dan moral sosial sudah terlalu jauh dan membeku. Untuk meluruskan kembali jalan pemerintahan dan pembangunan, agar selaras dengan moral sosial, diperlukan kebijaksanaan dan keberanian pemerintah yang tidak bertanggung-tanggung.

Kalau korupsi dan penyogokan dapat dianggap penyakit sosial, maka pengobatan konvensional tidak cukup untuk menyembuhkannya. Yang diperlukan adalah operasi. Tampaknya pemerintah akhir-akhir ini sudah sampai pada titik keputusan yang demikian.

Tugas pengawasan pemerintahan dan pembangunan, yang oleh presiden dipercayakan kepada Wakil Presiden, membuka peluang lebar untuk menyusun sistem pengawasan yang *feasible*, efisien dan efektif. Rapat-rapat berkala dengan para menteri, dengan staf menteri tingkat tinggi, dengan para gubernur dan pertemuan-pertemuan Wakil Presiden dengan pemimpin redaksi surat-surat kabar Jakarta, menunjukkan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas yang berat itu.

Sidak yang berkali-kali dilakukan oleh Wakil Presiden dan Menteri Kehakiman di bidangnya, mempunyai efek praktis dan psikologis dan karena itu perlu disusul oleh pejabat-pejabat tinggi lainnya. BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) akhir-akhir ini meningkatkan kegiatannya. Hasilnya tidak banyak diumumkan, tetapi efeknya meresap ke dalam tubuh badan-badan pemerintah.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAY. JEN. SUTOYO - CILILITAN JAKARTA TIMUR

SUMBER : *Kompas*

HARI/TGL. : *Slam 27-5-1985*

HAL./KOL. : *Sambingan
lar. 41/16*

KODE : *28*

Bepeka (Badan Pemeriksa Keuangan) tidak mau ketinggalan dan menunjukkan kemampuannya yang perlu diimbangi oleh DPR sebagai instansi penerima laporannya. Operasi besar yang dengan berani dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini dengan Inpres 4/1985, menghidupkan kembali kepercayaan masyarakat akan kesungguhannya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Yang selanjutnya ditunggu adalah, kapan pemerintah menjalankan operasi terhadap sarang-sarang penyakit lainnya di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Dulu para pemuda dan masyarakat ragu-ragu untuk membantu dalam usaha pemberantasan korupsi dan penyogokan. Takut kalau malahan kena dakwaan sendiri. Namun apabila tindakan drastis pemerintah diteruskan dengan konsekuen, para pemuda dan masyarakat akan lebih berani membantu dengan apa yang sekarang secara populer dinamakan *social control*. Apabila semuanya ini terjadi, tahun 1990 *Kompas* boleh mengadakan penelitian kembali. Hasilnya pasti berbeda.

* *Selo Soemardjan*, guru besar Sosiologi pada FISIP-UI, Jakarta.